

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penciptaan Karya

Laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, sebagai negara kepulauan menjadikan laut sebagai jantung dari perdagangan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Wilayah laut Indonesia yang luas menjadikan sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Garis pantai Indonesia yang membentang sepanjang 99.093 km membuat sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut yang dimana kondisi ini memperlihatkan bahwa laut tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial, ekonomi dan budaya bangsa Indonesia (Yistiarani, 2020).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bahwa potensi kelautan Indonesia sangat besar, dengan wilayah laut yang mencakup sekitar dua pertiga dari luas negara, yakni sekitar 5,8 juta km². Terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan perairan Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan bernilai tinggi (Nikawanti, 2021). Di banyak daerah, terutama di kawasan pantai selatan Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, laut menjadikan sumber utama penghidupan yang sekaligus menjadi bagian dari identitas dari komunitas pesisir. Masyarakat yang tumbuh di wilayah pesisir memiliki tradisi dan sistem dari pengetahuan yang mempunyai relasi antara manusia dan alam laut, baik dalam aspek ekonomi maupun spiritual.

Komunitas pesisir di Indonesia didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional, yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada hasil laut. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat lebih dari 2,3 juta rumah tangga nelayan tersebar di seluruh Indonesia dengan yang terbanyak terdapat di pesisir utara Jawa, Sulawesi selatan, dan pesisir Sumatera (Merdekawati & Sofyan, 2025). Ketergantungan terhadap ruang laut tersebut tercermin secara nyata di selatan Jawa yaitu di wilayah pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 telah memosisikan wilayah pesisir sebagai "Halaman Depan" pembangunan, dengan sektor kelautan sebagai pilar ekonomi utamanya (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2024).

Peran krusial nelayan tersebut tidak hanya berdampak pada skala rumah tangga, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul. Sepanjang tahun 2024, sektor perikanan tangkap mencatatkan pencapaian luar biasa dengan total hasil tangkapan menembus angka 4.058 ton (4.058.881 kg), yang didominasi oleh komoditas unggulan seperti tongkol, tuna, cakalang, layur, hingga lobster (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2024). Aktivitas ini menghasilkan perputaran uang yang sangat besar, yakni mencapai Rp 81,5 miliar dengan rata-rata pendapatan per nelayan mengalami peningkatan yang stabil (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2024). Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan ini membuktikan bahwa nelayan adalah motor penggerak utama dalam merealisasikan visi "Halaman Depan" pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2024).

Namun, kehidupan nelayan tidak lepas dengan tantangan besar. ketergantungan pada kondisi alam menjadikan profesi ini sangat berisiko, mulai dari perubahan cuaca ekstrem, keterbatasan teknologi, hingga harga jual hasil laut yang tidak menentu. Aktivitas melaut sering kali dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan tanpa perlindungan yang memadai, sementara kondisi cuaca yang tidak menentu dan gelombang laut yang ekstrem kerap mengancam. Profesi nelayan memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap paparan bahaya di lingkungan kerja, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan serta kecelakaan kerja. Berbagai bentuk kecelakaan kerja yang terjadi pada nelayan di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari cedera ringan hingga yang berakibat fatal, mencakup luka ringan, luka sedang, luka berat, terkilir, patah tulang, luka bakar, hingga menyebabkan kematian (Lubis, 2024).

Besarnya risiko tersebut terefleksi secara nyata dalam data statistik kecelakaan laut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2025, telah terjadi 62 kasus kecelakaan laut

dengan total 107 korban. Dari keseluruhan korban tersebut, sebanyak 10 orang ditemukan meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang (Subarkah, 2025). Tingginya angka fatalitas ini mempertegas bahwa profesi nelayan di pesisir selatan merupakan pekerjaan yang bertaruh nyawa di tengah minimnya sistem deteksi dini dan perlindungan teknis yang memadai di lapangan. Angka kecelakaan ini bukan sekadar data statistik, melainkan representasi dari ancaman nyata yang setiap hari menghantui para nelayan dalam upaya mereka menopang ekonomi daerah.

Kesenjangan antara kontribusi ekonomi yang masif dan perlindungan sosial bagi nelayan menciptakan sebuah ironi besar dalam tata kelola sektor kelautan di Kabupaten Gunungkidul. Meskipun sektor perikanan mampu menyumbangkan nilai penjualan yang sangat fantastis hingga mencapai Rp81,5 miliar pada tahun 2024, jaminan perlindungan bagi subjek utamanya justru masih absen dari skema anggaran daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul secara terbuka mengakui bahwa saat ini pemerintah daerah belum mampu menyediakan bantuan premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan karena keterbatasan alokasi dalam APBD (Subarkah, 2025).

Ditengah kehidupan nelayan yang lekat dengan risiko dan ketidakpastian menjadikan mereka tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kekuatan spiritual dan kepercayaan yang tumbuh dari sebuah hubungan interaksi antara manusia dengan laut yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Ditengah ancaman bahaya dan keterbatasan fasilitas keselamatan, masyarakat pesisir membangun sistem nilai dan tradisi yang berfungsi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Salah satu bentuk dari bukti tersebut adalah ditemukannya tradisi sedekah laut yang merupakan sebuah ritual adat yang telah menjadi bagian dari identitas budaya pesisir di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di pesisir selatan pulau jawa.

Tradisi sedekah laut merupakan praktik budaya masyarakat pesisir yang tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan nelayan yang penuh resiko dan ketidakpastian. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut, sedekah laut bukan sekedar perayaan tahunan atau warisan adat, melainkan ekspresi

rasa syukur sekaligus permohonan keselamatan atas pekerjaan yang memiliki resiko tinggi atau berbahaya. Laut yang bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai ruang yang menyimpan ancaman, sehingga hubungan manusia dengan laut dibangun melalui dimensi spiritual, sosial dan simbolik.

Pelaksanaan sedekah laut yang biasanya dilakukan di waktu tertentu, seperti pada bulan Suro dalam Kalender Jawa, menunjukkan cara masyarakat pesisir menghormati alam dan menyadari ketergantungan hidup mereka pada laut. Prosesi doa bersama dan penyajian sesaji dipahami sebagai usaha masyarakat untuk memohon perlindungan dan ketenangan, sekaligus sebagai pengingat bahwa pekerjaan nelayan selalu dihadapkan dengan ketidakpastian. Melalui tradisi ini, masyarakat menyalurkan rasa takut dan harapan mereka terhadap keselamatan secara bersama-sama. Selain itu, sedekah laut memperkuat hubungan antarwarga pesisir. Kegiatan yang dilakukan secara bersama membuat masyarakat merasa saling terhubung dan saling menjaga. Rasa kebersamaan ini penting karena keselamatan nelayan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Tradisi Sedekah Laut dengan demikian menjadi simbol hubungan manusia dengan laut, sekaligus bentuk upaya masyarakat pesisir dalam menjaga rasa aman di Tengah risiko yang mereka hadapi setiap hari (Afriansyah & Sukmayadi, 2022)

Dalam dokumenter ini, sedekah laut yang menyoroti realitas dan keselamatan nelayan, sedekah laut di Pantai Baron dapat dipandang sebagai reresentasi visual dan naratif tentang cara masyarakat pesisir memaknai hidup ditengah ketidakpastian. Tradisi ini menjadikan sebuah refleksi bagaimana nelayan menghadapi bahaya laut tidak hanya melalui alat dan keterampilan, tetapi juga melalui kepercayaan, ritual, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, sedekah laut tidak hanya hadir sebagai praktik budaya, melainkan sebagai cerminan nyata dari Upaya masyarakat pesisir dalam mencari rasa aman dan keselamatan di Tengah laut yang tidak pernah sepenuhnya dapat dipahami.

Untuk menghadirkan realitas tersebut secara utuh, film dokumenter menjadi media yang paling efektif. Melalui pendekatan visual dan naratifnya, dokumenter mampu menangkap dinamika kehidupan masyarakat secara faktual sekaligus

emosional. Dokumenter menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan empati dan kesadaran sosial terhadap isu yang diangkat. Menurut Paul Wells dalam Magriyanti & Rasminto (2020), menyebutkan bahwa film dokumenter merupakan bentuk karya nonfiksi yang menggunakan *footage* actual dari peristiwa nyata, termasuk hasil rekaman langsung, wawancara, data riset dan materi pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Dalam konteks sedekah laut, film dokumenter menjadi relevan dalam menyoroti keseharian para nelayan, makna spiritual, serta risiko yang mereka hadapi dalam mencari nafkah di laut.

Situasi ini menggambarkan bahwa perjuangan nelayan untuk memperoleh hak atas perlindungan dan jaminan keselamatan yang layak masih terus berlangsung, serta membutuhkan dukungan yang lebih nyata dari pihak pemerintah melalui kebijakan yang inklusif. Fenomena ketiadaan jaminan formal di tengah risiko nyawa yang ekstrem inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis dalam memproduksi film dokumenter "Aku Pulang".

Pada tulisan ini menguraikan tentang bagaimana peran dari seorang *Director of Photography* (DoP) dalam proses produksi dalam membentuk makna visual. Tidak hanya itu, seorang DoP juga harus mampu mengatur aspek teknis dan juga memahami konteks sosial dan emosional dari isu yang diangkat agar visual yang dihasilkan mampu menyampaikan pesan mendalam terhadap situasi yang terjadi. Menurut Rahmadina (2025), penerapan unsur sinematografi oleh DoP berperan penting dalam membangun atmosfer dan persepsi penonton terhadap realitas yang ditampilkan, di mana visual digunakan untuk menegaskan nilai dan makna dari peristiwa yang direkam.

1.2. Manfaat Penciptaan Karya

1.2.1. Manfaat Karya Secara Akademis

Pada karya ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang sinematografi, khususnya mengenai peran *Director of Photography* (DoP) dalam mengkonstruksi realitas dan makna keselamatan bagi nelayan melalui visual dokumenter.

1.2.2. Manfaat karya secara praktis

Pada pembuatan karya ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dan kesejahteraan nelayan sebagai bagian dari komunitas pesisir. Selain itu, film dokumenter ini juga diharapkan dapat memperkenalkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat pantai selatan Yogyakarta kepada khalayak luas melalui pendekatan visual yang informatif dan humanis.

